

Konsep Dasar dan Teori Partisipasi Pendidikan

Nana Suryana¹, Mumuh², Cecep Hilman³

^{1,2}Mahasiswa Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia

³Dosen Pascasarjana Institut Madani Nusantara Sukabumi, Indonesia

E-mail: naazzamy20@gmail.com, mumuhsuhandu@gmail.com, cecephilman77@gmail.com

Article History: Received: 2022-10-22 || Revised: 2022-11-26 || Published: 2022-12-29

Sejarah Artikel : Diterima: 2022-10-22 || Direvisi: 2022-11-26 || Dipublikasi: 2022-12-29

Abstract

Among the problems in education at this time is the lack of participation between educational institutions, the community, or policyholders in carrying out education, the inequality of the role of participation results in the learning process not being optimal. Then it becomes a necessity for all of us to revitalize the understanding and application of participation theory so that the purpose of education can be carried out perfectly. In previous studies, it has been found that the role of community participation is very vital in carrying out its function as a supporter of education. Communities that provide support for education, by participating in organizing, running, and evaluating together the results of education, will be easier to create an education system that is following the urgent needs of education in the community. The community will benefit from this participation by giving birth to a new, more intellectual society, and can overcome life problems that occur in society. The lack of public awareness in playing an active role in educational activities will result in education that can only be controlled and formed by educational institutions, regardless of community needs so that the resulting graduates are not able to provide life solutions, even just as a burden on society that is worth zero.

Keywords: Participation; Community; Education.

Abstrak

Diantara Permasalahan dalam pendidikan pada saat ini adalah kurangnya partisipasi antara lembaga pendidikan, masyarakat, atau para pemegang kebijakan dalam menjalankan Pendidikan, ketimpangan peran partisipasi mengakibatkan proses pembelajaran tidak maksimal. Maka menjadi sebuah keharusan bagi kita semua untuk merevitalisasi pemahaman dan penerapan teori partisipasi, sehingga tujuan Pendidikan dapat terlaksana dengan sempurna. Dalam penelitian sebelumnya telah ditemukan bahwa peran partisipasi masyarakat sangat vital dalam menjalankan fungsinya sebagai pendukung Pendidikan. Masyarakat yang memberikan dukungan terhadap Pendidikan, dengan ikut serta dalam mengadakan, menjalankan, serta mengevaluasi Bersama hasil Pendidikan, akan lebih mudah menciptakan system Pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan Pendidikan yang urgent di masyarakat. Masyarakat akan mendapatkan keuntungan dalam partisipasi ini dengan melahirkan masyarakat baru yang lebih intelektual, dan bisa mengatasi problem kehidupan yang terjadi di masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam berperan aktif dalam kegiatan Pendidikan akan mengakibatkan Pendidikan yang hanya dapat dikontrol dan dibentuk oleh Lembaga Pendidikan saja, tanpa melihat kebutuhan masyarakat, sehingga lulusan yang dihasilkan tidak mampu memberikan solusi kehidupan, bahkan hanya sebagai beban masyarakat yang bernilai nol.

Kata kunci: Partisipasi; Masyarakat; Pendidikan.

I. PENDAHULUAN

Membicarakan tentang partisipasi di seputar kehidupan manusia, tentunya sudah menjadi hal yang terbiasa dilakukan sejak jaman terdahulu. Namun seiring waktu nilai-nilai kebersamaan itu pun mengalami perubahan, terutama saat ini manusia terfokus pada teknologi yang mengurangi intensitas pertemuan dalam bermasyarakat, diantaranya dalam hal partisipasi masyarakat terkait dengan pendidikan. Semakin maju teknologi, manusia terpengaruh untuk lebih praktis dalam komunikasi melalui jejaring social internet, termasuk dalam pendidikan proses pembelajaran

lebih banyak menggunakan teknologi internet, sehingga pembelajaran dapat banyak dilaksanakan dari jarak jauh, tanpa harus tatap muka. Begitu juga pihak sekolah dan orang tua lebih banyak berkomunikasi melalui jejaring sosial internet dibandingkan bertatap muka langsung. Semakin luas jangkauan internet, dunia semakin dekat, namun kedekatan sesama manusia semakin jauh. Ketika orang membicarakan partisipasi (dalam sesuatu program atau kegiatan) maka akan sering sekali terumuskan sebagai harus mencakup partisipasi dalam perencanaan (pengambilan keputusan), pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan pemantauan serta evaluasi.

II. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan studi literatur sebagai pendekatan penelitiannya. Dengan mempelajari berbagai artikel seputar partisipasi yang dilakukan sekolah, masyarakat, pemerintah dalam Pendidikan. Data diperoleh dari kajian pustaka dan observasi dari pengalaman penulis sehingga terlahirlah kesimpulan kesimpulan yang akan dijabarkan dalam pembahasan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi pendidikan

Partisipasi dilihat dari segi bahasa, berasal dari bahasa Inggris “participation” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia pusat bahasa, partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta di dalamnya. Partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan mengenai penggunaan sumber daya publik dan pemecahan masalah publik. Partisipasi lebih sering diberi makna keterlibatan orang secara suka rela tanpa tekanan dan juga didefinisikan sebagai satu kontribusi dari wujud kesediaan masyarakat secara suka rela dalam setiap program kegiatan, diantara bentuknya adalah memberikan ide atau gagasan dalam perencanaan pembangunan masyarakat. Partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung percepatan tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. Partisipasi merupakan upaya uluran atau tawaran dari seseorang kepada orang lain bisa berupa gagasan pemikiran, ucapan perintah atau larangan, dan tindakan dalam rangka memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Atau juga dapat berupa pemberian barang dan jasa, sehingga mempermudah proses kinerja sesuai dengan harapan. Pendidikan merupakan proses peralihan atau transpormasi peradaban dari waktu ke waktu yang berisi tentang ilmu dan pengetahuan yang dialami oleh manusia, untuk mencapai peningkatan/pengembangan potensi manusia.

Konsep (istilah) partisipasi kerap diberi makna sebagai peran serta aktif seseorang dalam keseluruhan tahapan (proses) pembangunan atau program apapun, mencakup tahap pembuatan keputusan (perencanaan), pelaksanaan, pemanfaatan hasil, pemeliharaan, dan pemantauan serta evaluasi program. Pemberian makna seperti itu sering jaki menjebak peneliti mengenai partisipasi masyarakat, sehingga, karena tidak selalu mungkin masyarakat berpartisipasi secara menyeluruh (disebut sebagai partisipasi propesional), maka dari itu tingkat masyarkat menjadi rendah karena harus terukur dal asspek yang sudah disebutkan diatas. Dalam pandangan Islam Al- Quran menegaskan sebuah proses partisipasi tergambar dalam ayat diantaranya memerintahkan seorang untuk menjaga diri dan keluarga lainnya dari terjerumusnya pada lembah penistaan agama yang berujung penetapan hidupnya dalam kerusakan dan kekal dalam kehidupan neraka. Hal tersebut bersifat partisipasi kebijakan dari seorang kepala keluarga terhadap anggota keluarganya, atau partisipasi dari seorang pemimpin terhadap staf karyawannya. Seperti digambarkan pula dalam kehidupan bernegara, seorang pemangku kebijakan dapat memberikan partisipasi berupa keluarnya suatu kebijakan tentang pendidikan bagi warga masyarakatnya. Pendidikan yang berkaitan dengan keagamaan bagi masyarakat diselenggarakan oleh pemerintah atau dapat dilakukan oleh kelompok masyarakat berdasar pada kelompok keagamaannya yang disesuaikan dengan undang-undang. Hal ini pun sesuai dengan QS. At Taubah ayat 122:

﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾ ١٢٢

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya”.

Partisipasi pendidikan yang dilakukan oleh masyarakat tentunya memiliki kadar yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan yang akan dicapainya secara individu atau pun secara kelompok yang secara aktif terlibat dalam mengambil alih (memberikan kontribusi) untuk kepentingan (pendidikan) secara umum mulai dari perencanaan, pelaksanaan, memonitoring, sampai pada pengevaluasian. Partisipasi dapat berupa penguatan dalam bidang finansial, material, akademik, kultural budaya dan yang lainnya. Berbicara tentang pendidikan, hal pertama yang tersirat dalam benak kita adalah “sekolah”. Sekolah dalam hal ini merupakan suatu organisasi publik yang memberikan jasa layanan pendidikan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas individu masyarakat itu sendiri. Oleh karenanya, menjadi suatu hal yang wajar apabila masyarakat menuntut tersedianya “sekolah yang baik” yang tercermin dari efektifitas kinerja sekolah yang bersangkutan. Di sinilah manajemen mutu pendidikan di sekolah menuntut peran kepemimpinan kepala sekolah, profesionalisme guru, serta partisipasi masyarakat secara optimal. Mutu atau lebih sering disebut dengan istilah kualitas merupakan gambaran karakteristik menyeluruh dari barangatau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan pihak pengguna. Berkaitan dengan pendidikan di sekolah, mutu pendidikan senantiasa merujuk pada spesifikasi pelayanan pendidikan yang sesuai dengan tujuan atau manfaat dari pendidikan itu sendiri. Itulah sebabnya, dapat dikatakan bahwa keberhasilan suatu program pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu organisasi sekolah akan sangat sulit dicapai tanpa adanya keselarasan pandangan antara kepala sekolah, guru dan masyarakat tentang makna pendidikan yang sebenarnya, serta bagaimana seharusnya proses pendidikan di sekolah itu dilaksanakan. Oleh karenanya, sudah seharusnya lah pimpinan sekolah yang dalam hal ini adalah kepala sekolah, guru dan masyarakat bekerjasama secara terpadu dalam mewujudkan setiap cita-cita pendidikan untuk membentuk generasi penerus yang berkualitas baik dalam hal pengetahuan, keterampilan, maupun sikap dan moralnya.

Strategi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Keterlibatan secara individual, seperti membuka kesempatan dan konsultasi seluas- luasnya bagi orang tua peserta didik untuk datang ke sekolah/maadrasah.
2. Keterlibatan secara organisatoris, yaitu keterlibatan melalui komite sekolah/madrasah, organisasi alumni, dunia usaha/kerja, dan melalui hubungan dengan instansi lain.

B. Manfaat Partisipasi

Manfaat partisipasi yaitu menuju masyarakat yang bertanggung jawab. Masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan publik, akan menjadikan masyarakat yang bersangkutan membuka cakrawala dan mempertimbangkan kepentingan publik sehingga orang tersebut tidak semata-mata memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab mem-pertimbangkan kepentingan bersama. Meningkatkan proses belajar. Pengalaman berpartisipasi secara psikologis akan memberikan seseorang kepercayaan yang lebih baik untuk berpartisipasi lebih jauh. Menghilangkan perasaan terasing. Melalui turut aktifnya dalam suatu kegiatan, seseorang tidak akan merasa terasing, karena dengan berpartisipasi akan meningkatkan perasaan dalam seseorang bahwa ia merupakan bagian dari masyarakat. Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana Pemerintah. Ketika seseorang terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi kehidupannya, mereka akan cenderung memiliki kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program partisipasi masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik, serta menambahkan kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan. Menciptakan kesadaran politik. Partisipasi

masyarakat pada tingkat lokal, menumbuhkan pendidikan nyata dari terjadinya partisipasi, sehingga seseorang bisa belajar demokrasi. Jadi, dengan terus berpraktik, pemerintahan dalam skala kecil akan membuat masyarakat belajar tentang cara mempraktikkannya dalam lingkup yang sudah besar lagi. Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan melalui partisipasi masyarakat distribusi yang lebih adil atas keuntungan pembangunan akan didapat, maka rentang kepentingan yang lebih luas tercakup dalam proses pengambilan keputusan.

C. Bentuk Partisipasi

Partisipasi memiliki tiga bentuk, yaitu: 1) Pikiran. Partisipasi dalam bentuk ini biasanya terdapat dalam mengidentifikasi masalah, pencarian solusi alternatif serta perencanaan aksi pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat untuk berpendapat terkait perkara yang sedang dirasakannya. 2) Tenaga. Partisipasi dalam bentuk tenaga dapat terwujud dalam tahap pelaksanaan. 3) Uang. Partisipasi dalam bentuk uang biasanya dilaksanakan ketika dalam satu program mengalami kekurangan.

D. Partisipasi pendidikan sebagai Hak

Pendidikan sebagai hak asasi manusia yang sangat mendasar, karenanya manusia pertama (Nabi Adam 'alaihis salam) tercipta sudah mendapatkan pendidikan dari Allah, sebagaimana firman-Nya didalam al quran surat al baqoroh ayat 31" *Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!"*. Pendidikan merupakan hak yang sangat asasi bagi masyarakat, hak ini tidak hanya sekedar janji melainkan menjadi hak secara konstitusional, sebagaimana tercantum dalam ketentuan undang-undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa : "*Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran*". Maka pendidikan bagi masyarakat warga negara menjadi kewajiban atas pemerintah untuk mengusahakan, menyelenggarakan pengajrannya bagi warganya yang diatur dalam pasal 31 ayat 2. Bahkan pada ayat 34 nya pemerintah menjamin warga fakir - miskin dan anak-anak yang terlantar untuk mendapatkan hak pendidikan. Ada tiga faktor yang berpengaruh kuat dalam membantu anak usia dini tumbuh kembang dengan baik, yaitu sekolah, lingkungan (masyarakat), dan keluarga. Keluarga merupakan pembentuk pribadi anak yang pertama karena waktu yang dihabiskan anak paling banyak di rumah, Pertumbuhan dan perkembangan anak berbeda-beda sesuai dengan bawaan masing-masing.

Pendidikan bagai sebuah pakaian yang tetap akan melekat pada tubuh pemiliknya. Maka keserasian pendidikan dengan pemakainya harus ada kesesuaian, baik dari segi ukuran atau jenjang-tingkat dan kebutuhan nilai-nilai yang sesuai dengan masyarakat dan negaranya. Maka pendidikan tidak bisa pandang sebagai sebuah barang yang dapat diimpor atau diekspor. Dalam artian bahwa tujuan pendidikan masyarakat harus disesuaikan dengan kultur kearifan local. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan yaitu Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 17 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa : Wajib belajar dasar 9 tahun (SD – SMP – SMA), yang mengacu pada pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyatakan : "*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social*". Begitu juga dalam peraturan Internasional terdapat penjaminan hak bagi setiap manusia agar mendapatkan Pendidikan-nya, serta dapat diperkuat dalam deklarasi univerval hak-hak asasi manusia pasal ke 26 pada ayat 1: Bahwa setiap orang/warga negara berhak memperoleh pendidikan secara cuma-cuma dan diwajibkan minimal tingkat dasar.

E. Partisipasi pendidikan bersama masyarakat

Partisipasi pendidikan dalam masyarakat dapat dilihat dari kiprahnya pendidikan itu sendiri yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama kiprah seorang pendidik dalam

proses program kemasyarakatan, namun peran pendidik di masyarakat pun tergantung pandangan masyarakat itu terhadap keberadaan pendidik dilingkungannya, dan dengan segala keterbatasan kompetensi yang dimiliki pendidik tentu tidak dapat memenuhi segala harapan masyarakat. Peran pendidik dalam kehidupan masyarakat setidaknya dapat memberikan contoh dan menjadi panutan bagi masyarakatnya, karena pendidik menjadi pemegang norma-norma kemasyarakatan yang harus tetap dijaga dan dilaksanakannya. Namun tanggungjawab utamanya bagi seorang pendidik adalah pengembangan pendidikan bagi masyarakatnya, berawal dari pengembangan kurikulum yang mengacu pada pemenuhan harapan masyarakatnya untuk dapat menghadapi tangan di masa depannya.

F. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan

Sebuah lembaga pendidikan yang mengadakan kontak dengan masyarakat akan memudahkan organisasi pendidikan tersebut menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi lingkungannya. Lembaga pendidikan lebih mudah menempatkan dirinya dalam masyarakat dalam arti dapat diterima sebagai bagian dari milik masyarakat. Dengan demikian, Hubungan masyarakat atau yang dikenal dengan term “humas” memiliki peran strategis dalam upaya pengembangan mutu lembaga pendidikan. Masyarakat yang dimaksud disini bisa orang tua murid atau masyarakat umum ataupun pihak yang berada di sekitar lingkungan sekolah. Partisipasi dalam dunia pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menjalankan tupoksi kepemimpinan dalam suatu manajemen sehingga semua elemen berperan aktif dalam kewajibannya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan kesuksesan bersama diantara partisipasi yang dapat dilaksanakan yaitu:

1. Menjalin koneksi komunikasi yang baik dan efektif
2. Melibatkan diri dalam segala program bersama untuk mensukseskannya
3. Memberdayakan Komite Madrasah

Dalam pandangan lain disampaikan bahwa upaya membangun partisipasi masyarakat dalam pendidikan masyarakat dapat dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Melakukan musyawarah bersama (Pihak Madrasah dengan Orang Tua dan Masyarakat sekitar Madrasah) terkait perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasinya.
2. Melakukan komunikasi dengan efektif (Antara Madrasah dengan Orang Tua juga Masyarakat sekitar Madrasah).
3. Melakukan kerjasama dalam pelaksanaan program Madrasah (Pihak Madrasah dengan Orang Tua dan Masyarakat sekitar Madrasah).

Peningkatan mutu menjadi semakin penting bagi institusi yang digunakan untuk memperoleh kontrol yang lebih baik melalui usahanya sendiri. Institusi/lembaga pendidikan harus mendemonstrasikan bahwa mereka mampu memberikan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik. Penentuan label/predikat bermutu dari suatu institusi salah satunya dapat ditentukan oleh konsumen (pengguna lulusan). Hubungan masyarakat atau yang dikenal dengan term “humas” memiliki peran strategis dalam upaya peningkatan mutu lembaga pendidikan. Masyarakat yang dimaksud disini bisa orang tua murid atau masyarakat umum ataupun pihak yang berada di sekitar lingkungan madrasah. Kedudukan Humas dinilai penting, sebab dengan kehadirannya, kesuksesan dan keberhasilan sebuah institusi akan dapat tercapai dengan baik dan maksimal. Disamping itu, banyak disebutkan bahwa keberhasilan pekerjaan dan tindakan yang dilakukan lembaga pendidikan, segalanya tergantung pada kepercayaan masyarakat terhadap pekerjaan dan tindakan itu. Maka sering dikatakan bahwa “in a democracy, the success of anything depends upon public confidence and public understanding”. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan, maka akan memberikan pula pengaruh keberhasilan pengembangan lembaga tersebut. Keikutsertaan dan kesadaran masyarakat untuk memikul tanggung jawab pendidikan bukan sekedar harapan tetapi merupakan suatu tuntutan yang mendesak yang harus diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan nyata di lapangan. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan, baik dalam lingkup masyarakat kecil maupun dalam skala yang lebih luas sebenarnya telah ada sejak dulu, yang tercermin dalam berbagai bentuk dan ekspresi di masyarakat.

G. Partisipasi dalam Komite Madrasah

Menurut UUSPN No. 20 tahun 2003 pasal 56 ayat 3, komite sekolah/madrasah adalah sebagai lembaga mandiri yang dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arah dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Kontribusi komite sekolah/madrasah antara lain menyangkut:

1. Penyusunan perencanaan strategik sekolah/madrasah, yaitu strategi pembangunan sekolah/madrasah untuk perspektif 3-4 tahun ke depan.
2. Penyusunan perencanaan tahunan sekolah/madrasah.
3. Mengadakan pertemuan terjadwal untuk menampung dan membahas berbagai kebutuhan, masalah, aspirasi dan ide-ide yang disampaikan oleh anggota komite sekolah/madrasah.
4. Memikirkan upaya-upaya yang mungkin dilakukan untuk memajukan sekolah/madrasah terutama yang menyangkut fasilitas
5. Mendorong sekolah/madrasah melakukan internal monitoring (school self assessment) dan melaporkannya untuk dibahas dalam forum komite sekolah/madrasah.
6. Membahas hasil-hasil tes. standar yang dilakukan oleh lembaga eksternal dalam upaya menjaga quality assurance.
7. Membahas laporan tahunan sekolah/madrasah sehingga memperoleh gambaran yang tepat atas penerimaan komite sekolah/madrasah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Partisipasi dalam Pendidikan dimulai dari melibatkan Masyarakat yang merupakan salah satu lingkungan yang mendukung pendidikan seorang individu. Karena di dalam lingkungan masyarakat inilah seorang anak belajar bersosialisasi, dan memperoleh keterampilan. Dalam lingkungan masyarakat dapat diperoleh pengetahuan dan keterampilan sekaligus, dikarenakan di dalam masyarakat terdapat sumber-sumber belajar yang banyak baik yang bersifat tersusun maupun tidak. Kaitan masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

1. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan baik dilembagakan maupun tidak dilembagakan.
2. Lembaga-lembaga masyarakat atau kelompok sosial masyarakat baik langsung maupun tidak langsung mempunyai peranan dan fungsi edukatif.
3. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun tidak dirancang dan dimanfaatkan.

Fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan sangat bergantung pada taraf perkembangan dari masyarakat dan sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Lembaga-lembaga masyarakat yang mempunyai peran edukatif yang sangat besar adalah kelompok sebaya, organisasi (kepemudaan, keagamaan, sosial, kebudayaan, ekonomi, politik) politik) dan media massa. Sebagai bagian dari masyarakat, maka mari kita hendaknya untuk lebih meningkatkan partisipasi dan kepedulian kita terhadap pendidikan yang ada di lingkungan tempat tinggal kita. Sehingga pendidikan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.

B. Saran

Upaya yang dapat dilakukan untuk menguatkan peran masyarakat dalam pendidikan, maupun peran stakeholder dalam memaksimalkan pendidikan, adalah dengan dibangunnya hubungan antara keduanya, dapat dilakukan dengan agenda musyawarah bersama, seminar pendidikan, evaluasi pendidikan, juga tidak membatasi ruang partisipasi hanya dalam membangun dana saja, akan tetapi masyarakat dan semua elemen pendidikan diikuti sertakan dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan rencana pendidikan. Selain itu hal ini tidak akan terwujud tanpa adanya kesadaran dari semuanya untuk senantiasa menjadikan pendidikan sebagai sebuah unsur yang sangat penting dalam membangun masyarakat menuju lebih baik.

DAFTAR RUJUKAN

Abdullah, Mulyana. "Manajemen Mutu Pendidikan Di Sekolah Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah, Profesionalisme Guru, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Mutu

- Pendidikan Di Sekolah." *Jurnal Penelitian Pendidikan* 17, no. 3 (2018): 190–98. <https://doi.org/10.17509/jpp.v17i3.9612>.
- Amirin, Tatang M. "Membedah Konsep Dan Teori Partisipasi Sera Implikasi Operasionalnya Dalam Penelitian Pendidikan." *Dinamika Pendidikan*, 2005.
- BAPPENAS RI. "PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1992 TENTANG PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN NASIONAL." *Demographic Research*, 2020, 4–7.
- Emmanuel Sujatmoko. "Hak Warga Negara Dalam Memperoleh Pendidikan." *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010): 182–211. <https://media.neliti.com/media/publications/110344-ID-hak-warga-negara-dalam-memperoleh-pendid.pdf>.
- Faiz aminuddin, Ahmad Thoyib Syir'ah. "Peningkatan Partisipasi Pendidikan Melalui Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Peserta Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati)." *Islamic Review: Jurnal Riset Dan ...*, no. 85 (2016): 217–41. <https://journal.ipmafa.ac.id/index.php/islamicreview/article/view/113>.
- Maujud, Fathul. "Peran Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah (Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Islahul Muta'Allim Pagutan Kota Mataram)." *Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. November (2017): 92–121.
- Normina. "Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan." *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan Volume* 14, no. 26 (2016): 71–85. <https://doi.org/10.18592/ittihad.v14i26.874>.
- Rohmani, Nani. "Analisis Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Di Seluruh Indonesia." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 5, no. 1 (2020): 625. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v5i1.262>.